DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS vii

DAFTAR ISI xi

BAB I SEJARAH, DEFINISI, DAN RUANG LINGKUP PERDAGANGAN ORANG 1

A. SEJARAH PERDAGANGAN ORANG 1

B. DEFINISI PERDAGANGAN ORANG 14

C. BENTUK-BENTUK DAN MODUS OPERANDI PERDAGANGAN ORANG 24

1. Eksploitasi Seksual 24
2. Kerja Paksa 32
3. Perbudakan dalam Rumah Tangga 36
4. Adopsi Anak antarnegara Secara Ilegal 38
5. Penjeratan Utang 39
6. Pengantin Pesanan 40
7. Perdagangan Organ Tubuh Manusia 43
8. Bentuk-Bentuk dan Modus Operandi Perdagangan Orang di Indonesia 47

D. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERDAGANGAN ORANG 50

1. Kemiskinan, Perpindahan Penduduk, dan Diskriminasi 50

2. Budaya Patriarki 53
3. Keuntungan Ekonomi yang Melimpah 55

BAB II DIMENSI PERDAGANGAN ORANG 59

A. PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI KEJAHATAN KERAH PUTIH 59
1. Pengertian dan Karakteristik Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime). 59
2. Ruang Lingkup Kejahatan Kerah Putih 66
3. Perdagangan Orang sebagai Kejahatan Kerah Putih 67

B. PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL 71
1. Selintas Pengertian dan Karakteristik Kejahatan Transnasional. 71
2. Perdagangan Orang sebagai Kejahatan Transnasional. 74

C. PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISASI. 91
1. Pengertian dan Fenomena Kejahatan Terorganisasi 91
2. Perdagangan Orang sebagai Kejahatan Terorganisasi 96

D. PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA 100

BAB III INSTRUMEN-INSTRUMEN INTERNASIONAL TENTANG PERDAGANGAN ORANG 105

A. PERIODE SEBELUM TAHUN 1945 105
1. International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic, 1904 105

2. International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic, 1910 108
3. International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children, 1921 . . 110
4. Slavery Convention, 1926 112
5. Forced Labor Convention, 1930 115
6. International Convention for the Suppression of the Traffic in Women of Full Age, 1933 118

B. PERIODE SETELAH TAHUN 1945. 120
1. Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others, 1949. 120
2. Abolition of Forced Labor Convention, 1957 . . 128
3. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1979 130
4. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplement the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000. 135
   a. Alasan, kedudukan, dan tujuan protokol . 135
   b. Terminologi, ruang lingkup, dan perbuatan yang dikriminalisasi 136
   c. Perlindungan korban 138
   d. Pencegahan, kerja sama, dan tindakan-tindakan lain 140

BAB IV LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. 145

A. LATAR BELAKANG SOSIAL. 145

B. LATAR BELAKANG EKONOMI 152

C. LATAR BELAKANG POLITIK 155

D. LATAR BELAKANG HUKUM 156

BAB V TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 167

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA 167

B. KEDUDUKAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM HUKUM PIDANA 171

C. PELAKU TINDAK PIDANA 177

D. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 179

1. Melakukan Perekrutan untuk Tujuan Eksploitasi (Pasal 2 Ayat (1)) 179

2. Memasukkan Orang ke Wilayah Indonesia untuk Tujuan Eksploitasi (Pasal 3) 185

3. Membawa Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri (Pasal 4) 189

4. Mengangkat Anak dengan Maksud untuk Dieksploitasi (Pasal 5) 189

5. Melakukan Pengiriman Anak yang Mengakibatkan Tereksploitasi (Pasal 6) 192

6. Menggerakkan Orang Lain Melakukan Tindak Pidana (Pasal 9) 193

7. Menggunakan atau Memanfaatkan Korban (Pasal 12) 196

8. Tindak Pidana Lain Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 19—24) 199

E. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH KORPORASI 205

F. PERCOBAAN, PEMBANTUAN, DAN PERMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 208

1. Makna Percobaan dan Pembantuan dalam KUHP 208

2. Konsep Dasar Permufakatan Jahat 217

3. Percobaan, Pembantuan, dan Permufakatan Jahat Tindak Pidana Perdagangan Orang . . . 218

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERDAGANGAN ORANG 223

A. KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA . . . 223

B. KESALAHAN NORMATIF DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 225

C. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH INDIVIDU 228

D. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH KORPORASI 230

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi . 230

2. Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang oleh Korporasi 241

3. Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang oleh Kelompok Terorganisasi 242

BAB VII SANKSI PIDANA PERDAGANGAN ORANG 245

A. PENGERTIAN PIDANA 245

B. SANKSI PIDANA DAN SANKSI TINDAKAN 247

C. SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN ORANG 251

1. Jenis-Jenis Sanksi Pidana 251

2. Lamanya Ancaman Sanksi Pidana 252
a. Perumusan sanksi pidana. 252
b. Ancaman pidana minimum khusus 254
3. Pemberatan Ancaman Sanksi Pidana. 263
4. Perbandingan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan KUHP 270

BAB VIII PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG. 273

A. PENGERTIAN PERLINDUNGAN HUKUM 273
B. PENGERTIAN SAKSI DAN KORBAN. 275
C. HAK-HAK SAKSI DAN KORBAN 280
D. URGENSI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 282
E. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 284

DAFTAR PUSTAKA 291

INDEKS 307

LAMPIRAN 317

* * * * * *